



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SINGKAWANG**

**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123  
Telp : (0562) 639472 Faks : (0562) 639472**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan pedoman perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan skala prioritas dalam rangka implementasi Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Selain itu juga Renja ini diharapkan akan menjadi acuan bagi semua unit kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam menjabarkan perencanaan tahunan serta penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Kami menyadari Renja yang disusun ini belum secara sempurna menggambarkan kinerja perencanaan yang ideal, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ke depan dapat terpadu, terarah, terukur dan berkesinambungan.

Akhirnya kami berharap melalui Renja ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Singkawang, Maret 2023

**KERALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SINGKAWANG**



**SIYARTO, S.ST,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660514 199010 1 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU</b> .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PD</b> .....	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	67
3.3. Program dan Kegiatan .....	68
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD</b> .....	92
<b>BAB V     PENUTUP</b> .....	108

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b>	Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022.....	8
<b>Tabel 2.2</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD .....	24
<b>Tabel 2.3</b>	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....	31
<b>Tabel 2.4</b>	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang .....	59
<b>Tabel 3.1</b>	Keterkaitan Antara Visi, Misi dengan Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	66
<b>Tabel 3.2</b>	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Hasil Pengerjaan.....	69
<b>Tabel 4.1</b>	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 .....	95

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan rencana kerja penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024.

Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Yang dimaksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 diharapkan dapat menjawab persoalan dan isu strategis terkait dengan mengatasi permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026. Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
2. Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026.

Renja ini disusun dengan melibatkan semua unit kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan harapan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja dan menjangking masukan dari hasil musrenbang kecamatan serta *stake holder* lainnya. Disamping itu juga melalui Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan akan memudahkan bagi seluruh pegawai untuk mencapai tujuan dinas secara terpadu, terarah dan terukur.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
40. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
41. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Dalam Daerah Tahun 2023 Nomor 13).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran kegiatan dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 secara tepat dan terarah pada tataran kebijakan, program dan kegiatan serta rencana penganggaran yang berbasis tupoksi, regulasi dan evaluasi.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

- a. sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

- Tahun 2024 berdasarkan skala prioritas dan isu permasalahan yang dihadapi dan harus segera ditangani;
- b. Sebagai pedoman rancangan awal yang diusulkan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
  - c. sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sebagai wujud kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

##### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Capaian kinerja pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Dalam capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari total anggaran yang dianggarkan untuk Belanja Operasional sebesar Rp 4.357.684.655,- dipergunakan untuk membiayai 11 program, 20 kegiatan dan 37 sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan sampai dengan akhir Bulan

Desember dengan realisasi keuangan sebesar Rp.34.123.705.000,- (95%).

Tabel 2.1  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Tingkat Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022 (n-1)	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06									
1	06	02								
1	06	02	2.03							
1	06	02	2.03	01						
1	06	02	2.03	02						
1	06	02	2.03	04						

						Jumlah ketersediaan data profil 26 kelurahan	2 kelurahan		Permukiman data profil 26 kelurahan	1 kelurahan	3,85%	0,00%	1 kelurahan	50,00%
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	<b>60%</b>		<b>60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>166,67%</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah orang terlantar, korban trafficking, dan orang pekerja migran terlantar	20 OT		2 OT	2 OT	100,00%	5 OT	7 OT	35,00%
						Jumlah orang terlantar yang meninggal dunia yang mendapatkan pelayanan	10 OTM		10 OTM	2 OTM	100,00%	2 OTM	4 OTM	40,00%
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>12%</b>		<b>12%</b>	<b>35,72%</b>	<b>297,67%</b>	<b>12,00%</b>	<b>23,86%</b>	<b>198,83%</b>
1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti</b>	<b>65%</b>		<b>65%</b>	<b>35,22%</b>	<b>54,18%</b>	<b>65,00%</b>	<b>67,72%</b>	<b>104,18%</b>
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima jaminan sosial	8 orang pendamping untuk 67 ODK		25 Orang	36 orang	144,00%	20 orang	56 orang	83,58%
						Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima jaminan sosial	12 orang pendamping untuk 145 lansia		25 Orang	48 orang	192,00%	25 orang	73 orang	50,34%

						Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang menerima jaminan sosial	20 Gelandangan dan Pengemis		10 Orang	12 orang	120,00%	10 orang	20 orang	100,00%
						Jumlah anak terlantar yang menerima jaminan sosial	50 anak		25 Orang	25 orang	100,00%	20 orang	45 orang	90,00%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah disabilitas, anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan alat bantu	30 Penyandang Disabilitas		89 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lansia terlantar yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan serta rehabilitasi sosial	40 orang lansia terlantar		20 orang lansia terlantar	20 orang lansia terlantar	100,00%	0	20 orang lansia terlantar	50,00%
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak fakir miskin dan anak orang tidak mampu terlantar yang mendapatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar (Paket Bantuan Pendidikan)	40 Anak		25 Anak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti</b>	<b>65%</b>		<b>65%</b>	<b>70,59%</b>	<b>108,60%</b>	<b>65,00%</b>	<b>67,80%</b>	<b>104,30%</b>
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sasaran garapan yang rawan terhadap penyakit sosial	26 Kelurahan		26 Kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam shelter	18 kasus PMKS		10 kasus PMKS	5 kasus	100,00%	12 kasus	17 kasus	94,44%

1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) produktif yang menerima pelatihan di Balai Besar Kemensos	10 ODK		6 Orang PPKS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Jumlah Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa Terlantar yang mendapatkan pelayanan	80 Eks Pasien RJS Terlantar		43 Eks Pasien RJS Terlantar	31 orang	72,09%	43 orang	74 orang	92,50%
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS</b>	<b>75%</b>		<b>75%</b>	<b>81,54%</b>	<b>108,72%</b>	<b>75,00%</b>	<b>78,27%</b>	<b>104,36%</b>
1	06	05	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>65%</b>		<b>65%</b>	<b>35,00%</b>	<b>53,85%</b>	<b>65,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>76,92%</b>
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah penanganan kasus ABH	50 kasus ABH		25 kasus ABH	25 kasus ABH	100,00%	25 kasus	25 kasus ABH	50,00%
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota</b>	<b>65%</b>		<b>65%</b>	<b>83,79%</b>	<b>128,91%</b>	<b>65,00%</b>	<b>74,40%</b>	<b>114,45%</b>
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas validasi dan verifikasi Penerima Jaminan Kesehatan Kota Singkawang	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan		74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	100,00%	70 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan	100,00%
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan		74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan	100,00%	41 org petugas	74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan	100%

						Jumlah Produk Hukum tentang Data Fakir Miskin	0		1 Perwako	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						Jumlah aplikasi Pengelolaan data Fakir Miskin yang disediakan	0		1 aplikasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Koordinator dan Pendamping PKH yang memberikan pelayanan	26 Orang		26 Orang	25 Orang	100,00%	25 Orang	25 Orang	96,15%
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu	40 KUBE, 400 KPM		10 KUBE, 100 KPM	10 KUBE, 100 KPM	100,00%	10 KUBE (100 KPM)	10 KUBE (100 KPM)	25,00%
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Dalam Skala Kota</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>70%</b>		<b>70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>142,86%</b>	<b>70,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>121,43%</b>
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah estimasi korban bencana dan pasca bencana yang menerima bantuan tanggap darurat	250 KK 1.250 jiwa		125 KK 625 jiwa	56KK 203 jiwa	17,27%	125 KK 625 jiwa	181 KK, 1250 jiwa	72,40%
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat yang mendapatkan penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial	10 KK fakir miskin		5 KK fakir miskin	4 KK fakir miskin	80,00%	5 KK fakir miskin	10 KK fakir miskin	100%
						Jumlah Produk Hukum tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	3 Perwako		3 Perwako	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>60%</b>		<b>60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>133,33%</b>

1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Tagana yang melaksanakan penangan tanggap darurat dan peningkatan kapasitas TAGANA	28 orang anggota Tagana		28 orang anggota Tagana	25 orang anggota Tagana	89,29%	26 orang anggota Tagana	26 orang anggota Tagana	92,86%
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing</b>	<b>40%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1 TMP Bambu Runcing		1 TMP Bambu Runcing	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan	1 TMP Bambu Runcing		1 TMP Bambu Runcing	100,00%	100,00%	1 TMP Bambu Runcing	100,00%	100,00%
						Jumlah kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan daerah	1 Kegiatan (Hari Pahlawan)		1 Kegiatan (Hari Pahlawan)			1 Kegiatan (Hari Pahlawan)	100,00%	100,00%
2	08				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Kelembagaan PUG Aktif</b>	<b>13%</b>		<b>13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>100,00%</b>
2	08	02	2.01		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota</b>	<b>50%</b>		<b>50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PUG melalui PPRG	25 OPD		25 OPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	02	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>10%</b>		<b>10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>50,00%</b>
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1450 orang		0	0,00%	0,00%	250 orang	250 orang	17,24%
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b>68%</b>		<b>68%</b>	<b>58,33%</b>	<b>85,78%</b>	<b>75,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>98,04%</b>
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor TPPO dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	0%		30 orang/100 orang	30 orang/100 orang	100,00%	0%	30 orang/100 orang	100%
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan korban yang ditangani	110 kasus		60 kasus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	03	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Koordinasi</b>	<b>75%</b>		<b>75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>133,33%</b>	<b>75,00%</b>	<b>87,50%</b>	<b>116,67%</b>

2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan/reintegrasi sosial	30 orang		30 orang	10 orang	33,33%	10 orang	20 orang	66,67%
2	08	03	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	65%		65%	60,87%	93,65%	0,00%	30,44%	46,82%
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Mendapatkan Pengetahuan Tentang Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	80 orang		50 orang	40 orang	80,00%	0,00%	40 orang	50,00%
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan</b>	100%		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>	45%		45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pada kegiatan penyuluhan	200 Orang		200 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan kepala keluarga di Kota Singkawang yang mengikuti pelatihan	200 Orang		200 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	40%		40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah tingkat kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	15 OPD		15 OPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender dan Anak</b>	<b>10%</b>		<b>10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	40%		40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya data gender dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>34%</b>		<b>34%</b>	<b>36,81%</b>	<b>108,26%</b>	<b>34,00%</b>	<b>35,41%</b>	<b>104,13%</b>
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	50%		50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Mandiri KLA	1 Dokumen		1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>62%</b>		<b>62%</b>	<b>87,10%</b>	<b>140,48%</b>	<b>62,00%</b>	<b>74,55%</b>	<b>120,24%</b>
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam forum anak daerah dan jumlah anak yang terpilih dalam pengurus inti	100 orang; 9 orang		100 orang; 9 orang	95 orang	87,16%	100 orang	195 orang	178,90%
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga teknis, pejabat terkait, orang tua, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan pengembangan layanan ramah anak	80 orang		80 orang	0,00%	0,00%	120 orang	120 orang	150,00%
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengetahuan atau keterampilan baru yang dikuasai anggota forum anak	5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan		5 Jenis Pengetahuan / Keterampilan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	500 orang		500 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi	90%		90%	100,00%	111,11%	90,00%	95,00%	105,56%

2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	23 Kasus		30 Kasus	26 kasus	86,67%	30 kasus	56 kasus	243,48%
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak berbakat, anak kelompok rentan dan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dimonitor	30 orang		30 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	08	07	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>60%</b>		<b>60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Perlindungan Anak yang meningkat Kapasitasnya	60 orang		60 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	06				<b>NON URUSAN</b>									
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>98,06%</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	98,06%	98,06%	100,00%	99,03%	99,03%

1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, Renja Perubahan, Perjankin, Perjankin Perubahan)	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (LAKIP, SPM, LPPD)	6 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	6 Dokumen	100%
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PMPRB dan SAKIP	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	28 Orang		24 Orang	24 Orang	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		100%	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	06	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50%</b>

1	06	01	2.02	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	100%		100%	0%	0,00%	100%	100%	100%
1	06	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	100%		100%	0%	0,00%	0%	100%	100%
1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	80 stel		79 stel	79 stel	100,00%	0	79 stel	98,75%
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%		100%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%

1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	1 Unit Mobil Pick up dan 3 Unit Motor KLX		1 Unit Mobil Pick up dan 3 Unit Motor KLX	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	100%		100%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	3 Unit PC dan 3 Unit Printer		2 unit laptop	2 unit	100,00%	0	0,00%	0,00%
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>63,77%</b>	<b>63,77%</b>	<b>100%</b>	<b>81,89%</b>	<b>81,89%</b>

1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
						Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan	12 Kali		12 Kali	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang dipelihara	100%		100%	99,50%	99,50%	100%	100,00%	100,00%
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	26 Unit		26 Unit	26 Unit	100,00%	26 Unit	100,00%	100,00%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai penyelenggara pelayanan dalam urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerjanya, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Persentase Penanganan PMKS, Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi, dan Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA). Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
														(thn n-1)	(thn n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Penanganan PMKS			66,00%	67,00%	68,00%	69,00%	70,00%	64,86%	67,95%	69,94%	70,19%	96,17	71,94%	74,44%	
2		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	80,00%	26,21%	12,60%	22,89%	22,94%	8,20	24,88%	26,98%	
3		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		55,00%	60,00%	65,00%	75,00%	75,00%	3,65%	24,10%	34,72%	34,74%	3,25	45,34%	54,84%	
4		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		55,00%	60,00%	65,00%	75,00%	75,00%	56,52%	34,94%	40,00%	40,08%	21,51	45,06%	51,56%	
5		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	75,00%	0,00%	66,67%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	
6		Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana		50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	85,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	

7			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	-	-	25,93%	34,36%	34,42%	12,30%	42,79%	51,22%	
8			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	
9	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi			9,00%	11,00%	13,00%	15,00%	17,00%	9,02%	12,16%	7,19%	8,06%	10,58%	15,30%	18,44%	
10			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,02%	8,84%	0,26%	0,05%	0,08%	
11			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	-	-	-	22,37%	4,29%	8,53%	28,95%	5,65%	6,89%	
12	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)			400	500	550	600	650	398,35	556,9	0	533,75	681,55 %	610	665	
13			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,03%	0,04%	94,00%	0,04%	0,05%	



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2021 dalam hasil pengukuran sasaran Strategis :

#### 1. Menurunnya Jumlah PMKS

Persentase Penanganan PMKS realisasinya sebesar 70,19%. Realisasi 70,19% diperoleh dari data Jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 51.764 orang dibagi dengan 73.748 jumlah PMKS di Kota Singkawang dikali 100%. Nilai realisasi ini menunjukkan hasil yang dicapai melebihi target dan semakin besarnya realisasi penanganan PMKS sehingga hal ini menunjukkan semakin tingginya kinerja Penanganan PMKS. Adapun target Persentase Penanganan PMKS (%) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebesar 69,00%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 101,73%

#### 2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi

Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi terealisasi sebesar 8,06%. Realisasi 8,06% diperoleh dari data jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 404 orang dibagi dengan 5.010 jumlah perempuan rentan di kota Singkawang. Adapun target Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebesar 15,00%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dikategorikan “**Tidak Berhasil**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 53,76%.

### 3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak

Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) terealisasi sebesar 533,75. Skor 533,75 nilai kota layak anak ini diperoleh berdasarkan penilaian 7 (tujuh) aspek yang dikirim ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun target Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2021 adalah 600. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 88,96%

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan di Kota Singkawang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya:

#### I. Permasalahan Urusan Sosial

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu yang memerlukan penanganan khusus serta PSKS belum berperan secara optimal;

2. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
3. Belum tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat.
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
6. Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial.

## **II. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, maka kegiatannya hanya dilakukan melalui pembinaan kelompok wanita;
2. Pandemi Covid-19 berdampak pada kurang kelancaran pelaksanaan kegiatan anak, sehingga perlu menyesuaikan bentuk kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan;
3. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
4. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
5. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
6. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
7. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

8. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama pada belum secara keseluruhan terakomodir
9. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
10. Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
11. Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

### **III. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dimana apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang hanya mengandalkan sumber dana APBD Kota Singkawang tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Sosial RI, Kementerian PPPA RI, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga-

lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Singkawang, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Forum Anak Daerah (FAD), dan lain sebagainya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Singkawang terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu Sasaran Strategis pada Tujuan dari Misi Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
2. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang terhadap penanggulangan permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang;
3. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, FAD, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat begitu tinggi;
4. Tren alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari APBD Kota Singkawang yang terus meningkat setiap tahunnya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada bagian ini akan mereview perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perbandingan ini perlu dilakukan karena kemungkinan terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai namun besarnya berbeda.

Review terhadap rancangan awal RKPD kemudian dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6															
2	08				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR- BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				415.000.000	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR- BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				496.500.000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Singkawang	Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota	10%	75.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Singkawang	12,50%	118.000.000		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota	0%	0	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	7%	35.000.000		
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kota Singkawang	Jumlah PD yang melaksanakan PUG melalui PPRG	0	0						
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Singkawang		0	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Singkawang	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota			
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45%	34.400.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35%	77.400.000	

2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Kota Singkawang	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0			22 Organisasi	34.400.000		
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Kota Singkawang		5 Organisasi	34.400.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Kota Singkawang	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	43.000.000	
2	08	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan</b>	<b>30%</b>	<b>40.600.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan</b>	<b>73%</b>	<b>40.600.000</b>	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang		50 Orang	23.100.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	50 orang	23.100.000	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang		30 Dokumen	17.500.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang tersedia	30 Dokumen	17.500.000	
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	<b>65%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	<b>78%</b>	<b>75.000.000</b>	
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>27.500.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>27.500.000</b>	

2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang		1 Dokumen	27.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1 dokumen	27.500.000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah pengaduan dan korban yang ditangani	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota		-	
2	08	03	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi</b>	<b>83%</b>	<b>47.500.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi</b>	<b>84%</b>	<b>47.500.000</b>	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang		10 Orang	47.500.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten / kota yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	47.500.000	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota			
2	08	03	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>			

2	08	03	2.03	02	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Partisipasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan			Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota				
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan</b>				
2	08	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>	<b>5%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>	<b>92%</b>	<b>30.000.000</b>		
2	08	04	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang		0	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	21%	30.000.000		
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kota Singkawang	Jumlah peserta penyukluhan									
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah perempuan kepala keluarga di Kota Singkawang yang mengikuti pelatihan	1 Dokumen	30.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	30.000.000		
3	08	04			<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</b>									

4	08	04			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah perangkat daerah tingkat kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu (GSI)								
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender dan Anak</b>						100%	38.500.000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data						100%	38.500.000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah tersedianya data gender dan anak						1 Dokumen	38.500.000	
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Cakupan Lembaga yang melaksanakan pemenuhan Hak Anak</b>	39%	160.000.000	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Cakupan Lembaga yang melaksanakan pemenuhan Hak Anak</b>	39%	160.000.000	
2	08	06	2.01		<b>Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Singkawang	<b>Peningkatan jumlah lembaga yang melakukan pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha</b>	2 Lembaga	30.000.000	<b>Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Singkawang	<b>Peningkatan jumlah lembaga yang melakukan pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha</b>	2 lembaga	30.000.000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Evaluasi Mandiri KLA	0	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang		1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	30.000.000	

2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>67%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>67%</b>	<b>130.000.000</b>	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam forum anak daerah dan jumlah anak yang terpilih dalam pengurus inti	95 Orang	93.000.000	Penyediaan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	95 orang	93.000.000	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah tenaga teknis, pejabat terkait, orang tua, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan pengembangan layanan ramah anak			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah jenis pengetahuan atau keterampilan baru yang dikuasai anggota forum anak			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah peserta pada kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	1 Dokumen	37.000.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	37.000.000	
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komperhensif</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	
2	08	07	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten</b>	Kota Singkawang	Persentase OPD yang aktif dalam pencegahan kekerasan anak	62%		Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Persentase OPD yang aktif dalam pencegahan kekerasan anak	62%	25.000.000	

					/Kota										
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota			
2	08	07	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi</b>	<b>91%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase penyediaan layanan AMPK yang memerlukan koordinasi</b>	<b>91%</b>	<b>75.000.000</b>	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota	Kota Singkawang	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten / Kota	26 Orang	44.200.000	Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota	Kota Singkawang	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten / Kota	26 Orang	44.200.000	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota		Jumah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota								
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi , Informasi dan edukasi anak yag memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota		Jumlah dokumen Pengembangan Komunikasi , Informasi dan edukasi anak yag memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota								
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	1 Dokumen	30.800.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Singkawang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	30.800.000	

2	08	07	2.03		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>			<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan AMPK</b>	<b>30,00%</b>		
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota			Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota			0
2	08	07	2.03	05	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota			Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota			0

1	06				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR- BIDANG SOSIAL									1.815.794.571	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	73,59%	265.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	73,00%	166.292.000	
												Persentasea Kesejahteraan/ kemandirian keluarga miskin	100%	100.000.000	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Anak-anak terlantar Skala Kota	100%	23.600.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Anak-anak terlantar Skala Kota	100,00%	23.600.000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah penanganan kasus ABH			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Singkawang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapa Rujukan Kewenangan Kab/Kota	27	23.600.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Singkawang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	23.600.000	
3	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Singkawang				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Singkawang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	47,18%	142.433.830	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	52%	142.692.000	
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS			92%	98.966.170	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS			49%	100.000.000		

1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah petugas validasi dan verifikasi Penerima Jaminan Kesehatan Kota Singkawang	600 KK	63.573.400	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang didata	600 Kk	63.831.570
2	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Kemiskinan	300 KK	54.644.260	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir miskin Kab/Kota	300 KK	54.644.260
3	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Koordinator dan Pendamping PKH yang memberikan pelayanan	6572 KPM /KPH	98.966.170	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6572 KPM PKH	100.000.000
4	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu	120 Orang	24.216.170	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	120 orang	24.216.170
1	06	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri</b>	<b>35%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Telah Diberdayakan</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.000.000</b>
1	06	02	2.02		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase terlaksannya penerbitan Izin sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase terlaksannya penerbitan Izin sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	10.000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	20.000.000
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	<b>40%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	<b>40,00%</b>	<b>163.000.000</b>

1	06	02	2.03	01	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pembinaan/bimbingan/rakor			Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pembinaan/bimbingan/rakor	46 PSM	49.500.000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	19.500.000	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	19.500.000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	27.500.000	-
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	4 Lembaga	50.500.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	50.500.000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Singkawang	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	2 Sertifikat		Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Singkawang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 sertifikat	16.000.000	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>50,35%</b>	<b>1.096.086.018</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.096.086.018</b>	

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Singkawang	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	25%	871.711.018	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Singkawang	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	871.711.018
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	468.111.018	Penyediaan Permakanan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	45 LU 40 AT 33 PD 10 Gepeng	468.111.018
2	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	13 AT 17 PD	19.800.000	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	13 AT 17 PD	19.800.000
3	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 LU 17 PD	22.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 LU 17 PD	22.000.000
4	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	25.000.000
5	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	36.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	36.000.000

6	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	23.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	23.000.000
7	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	11.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	11.000.000
8	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	12.750.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	12.750.000
9	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	8.750.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	8.750.000
10	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.750.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.750.000
11	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	8.550.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	8.550.000
12	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Singkawang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	200.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Singkawang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	200.000.000

1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Singkawang	Prosentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	24,83%	224.375.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Singkawang	Prosentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	224.375.000	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	4.750.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	4.750.000	
2	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.755.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.755.000	
3	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	99.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	99.000.000	
4	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.000.000	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.000.000	

5	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	40.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	40.000.000
6	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.000.000
7	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	15.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Singkawang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	15.000.000
8	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Singkawang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Singkawang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000
9	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	7.850.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	7.850.000

10	06	04	2.02	10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.590.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.590.000
11	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	4.655.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	4.655.000
12	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3.775.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3.775.000
13	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Singkawang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Layanan Rujukan	Kota Singkawang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
14	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>	<b>7.700.000</b>

1	06	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	<b>100%</b>	<b>7.700.000</b>	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Kota Singkawang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Kota Singkawang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	7.700.000	
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Skala Kota</b>	<b>100%</b>	<b>125.716.553</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Skala Kota</b>	<b>100%</b>	<b>160.716.553</b>	
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>60.027.965</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>90.027.965</b>	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x7 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	287 Orang	25.000.000	Penyediaan Makanan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	287 Orang	55.000.000	
2	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	15.027.965	Penyediaan Sandang	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	15.027.965	

3	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Singkawang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	10.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Singkawang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	10.000.000
4	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	7.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	7.000.000
5	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Singkawang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	3.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Singkawang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	3.000.000
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Skala Kota</b>	<b>100%</b>	<b>65.688.588</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Kecamatan di Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Skala Kota</b>	<b>100%</b>	<b>70.688.588</b>
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 KSB	35.688.588	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 KSB	35.688.588
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	30.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	5 Kecamatan di Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	35.000.000

1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan Kondisi Baik	100%	102.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	102.000.000		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	100%	102.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	100%	102.000.000		
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan	1 Makam	102.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan	1 TMP	102.000.000		
2	13				<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				495.000.000	
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Kota Singkawang	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100%	49.500.000	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Kota Singkawang	Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya	100%	495.000.000		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Singkawang	Persentase data profil dan Evaluasi perkembangan Kelurahan yang selesai dan tepat waktu	100%	49.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Singkawang	Persentase data profil dan Evaluasi perkembangan Kelurahan	100%	110.000.000		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Singkawang	Jumlah Ketersediaan Data Profil Kelurahan	26 Data Profil	33.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Singkawang	Jumlah Ketersediaan Data Profil Kelurahan	26 Data Profil	38.500.000		

2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26 Dokumen	16.500.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26 Dokumen	71.500.000
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>23%</b>	<b>49.500.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diberdayakan</b>	<b>25,00%</b>	<b>385.000.000</b>
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan yang diberdayakan	6 lembaga	49.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan yang diberdayakan	2 lembaga	385.000.000
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Singkawang	jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat	31 TP. PKK	49.500.000	fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat		Jumlah organisasi pengurus PKK yang diberdayakan	2 LKK/LAD/MHA	49.500.000
2	13	05	2.01	03						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan		jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 LKK/LAD/MHA	60.500.000

2	13	05	2.01	04						fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan		jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 LKK/LAD/MHA	110.000.000		
2	13	05	2.01	06						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	49.500.000		
2	13	05	2.01	07						fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat		Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	1 laporan	27.500.000		
2	13	05	2.01	08						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen	38.500.000		
2	13	05	2.01	09						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	1 dokumen	49.500.000		
1	06				<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>5.015.495.225</b>	
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.078.408.683</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.767.295.225</b>		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kota Singkawang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kota Singkawang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	38.500.000		

1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.500.000	

1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.500.000	
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>1.796.808.683</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>3.456.695.225</b>	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	1.626.308.683	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	3.286.195.225	
2	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	165.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	165.000.000	
3	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	
1	06	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000</b>	
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	

2	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.500.000	
3	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	5.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	5.500.000	
1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000	
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>414.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>434.000.000</b>	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000	

2	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
3	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.500.000	
4	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.500.000	
6	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.500.000	
7	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	
8	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	

1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	25.000.000	
2	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	
3	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	35.000.000	
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>587.100.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>587.100.000</b>	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.100.000	
2	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	
3	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.000.000	

4	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000					
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000					
2	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	45.000.000					
3	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Cakupan gedung kantor yang dipelihara			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-					
4	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	15.000.000					
<b>JUMLAH</b>									<b>5.336.211.254</b>	<b>JUMLAH</b>									<b>7.574.589.796</b>



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2022 tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang terkait rencana pencapaian target RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan Renstra Perubahan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, hal ini menyebabkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk tahun 2023.

**Tabel 2.4**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PD**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1. Kementerian Sosial**

Tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Adapun tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, melalui indikator :
  - Indeks Kesejahteraan Sosial  
Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, melalui indikator :
  - Indeks Partisipasi Sosial
  - Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
  - Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
  - Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
  - Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, melalui indikator :
  - Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

### **3.1.2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan Kementrian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Pembangunan Gender (IPG);
  - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - TPAK Perempuan; dan d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Perlindungan Anak (IPA);
  - proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun;
  - persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
  - persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat dalam PPPA.
  - Indeks Kualitas Keluarga dalam PPPA.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
  - persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
  - persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (sumber: SNPCHAR);
  - persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPCHAR dan Simfoni);
  - persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
  - persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Reformasi Birokrasi;
  - Opini BPK atas Laporan Keuangan;
  - Tingkat Maturitas SPIP; dan
  - Nilai SAKIP

### 3.1.3. Kementerian Dalam Negeri

Perumusan visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemendagri telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Badan Litbang Kemendagri menyelaraskan tujuan Kemendagri dengan menetapkan tujuan strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, ditetapkan sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator sasaran strategis, sebagai berikut:
  - Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
  - Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah.
  - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
  - Kerjasama penelitian dan pengembangan.
2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder. ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
  - pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
- b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
  - Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
  - b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
  - c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator yaitu :
    - sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis yaitu :
    - Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.
    - Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.

- b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
- Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.
  - Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah.
  - Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan masyarakat. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan ke-1 RPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berkarakter.  
Indikator Tujuan : Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Sasaran ke-5 RPD : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah.  
Indikator Sasaran RPD : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan  
2. Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)
2. Tujuan ke-2 RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis untuk Penurunan Kemiskinan.  
Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka  
Sasaran ke-5 RPD : Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial  
Indikator Sasaran : Persentase PPKS Tertangani

Untuk memberikan gambaran informasi tentang keterkaitan Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
Keterkaitan Antara Rumusan Tujuan, Sasaran dan  
Indikator Sasaran

Visi : -

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan - Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis untuk Penurunan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani

Sumber : Perubahan RPD Kota Singkawang 2023-2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Awal	Target Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi Perempuan pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya dan Perlindungan Perempuan	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	32	35	37	40
		2. Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)	2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perlindungan Anak	2. Persentase Terpenuhi nya Indikator KLA	68,15	68,15	68,20	68,30	68,40
2	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	1. Meningkatnya Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Kemampuan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0	20	100	100	100
			2. Meningkatnya Pelayanan RPJS terhadap PPKS	2. Persentase Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Layanan RPJS	100	100	100	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan :  
Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Daerah, dengan sasaran program:
  - Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
  - Meningkatkan Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
  - Meningkatkan Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
  - Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak.
2. Urusan Sosial dengan tujuan :  
Meningkatnya Pelayanan Bidang Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan sasaran program :
  - Menurunnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tidak Tertangani
  - Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - Meningkatkan Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin
  - Terpenuhinya Kebutuhan Korban Bencana
  - Meningkatkan PSKS yang Telah diberdayakan
  - Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran program :
  - Meningkatkan Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan
  - Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan
4. Penunjang Urusan Lainnya, dengan sasaran program :
  - Meningkatkan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2024 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang pada Tahun 2024.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi rumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya ekonomi, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah.
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
3. Melakukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
4. Upaya melakukan Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan dan Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2024 sudah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Aturan Kepmendari Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari 15 Program, 29 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud meliputi :

## **A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

### 1. Program Pemberdayaan Sosial

#### 1.1 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

##### 1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

#### 1.2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

##### 1.2.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

##### 1.2.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

##### 1.2.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

##### 1.2.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

##### 1.2.5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

### 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

#### 2.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

##### 2.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

### 3. Program Rehabilitasi Sosial

#### 3.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

3.1.1 Penyediaan Permakanan

3.1.2 Penyediaan Sandang

3.1.3 Penyediaan Alat Bantu

3.1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

3.1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

3.1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

3.1.7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

3.1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

3.1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

3.1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan

3.1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

3.1.12 Pemberian Layanan Rujukan

#### 3.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

3.2.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

3.2.2 Pemberian Layanan Kedaruratan

3.2.3 Penyediaan Permakanan

3.2.4 Penyediaan Sandang

3.2.5 Penyediaan Alat Bantu

3.2.6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

3.2.7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- 3.2.8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  - 3.2.9 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - 3.2.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - 3.2.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - 3.2.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4.2 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
    - 4.2.1 Rujukan Anak-Anak Terlantar
  - 4.3 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.3.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.3.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.3.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - 4.3.4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana
- 5.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - 5.1.1 Penyediaan Makanan
    - 5.1.2 Penyediaan Sandang
    - 5.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
    - 5.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
    - 5.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial
  - 5.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
    - 5.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

5.2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga  
Bencana

5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

5.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

5.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional  
Kabupaten/Kota

**B. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan

1.1 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan  
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan  
Kabupaten/Kota

1.1.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang  
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

1.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan  
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan  
Ekonomi

1.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan  
pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia  
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan  
Kabupaten/Kota

1.2.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)  
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan

2.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah  
Kabupaten/Kota

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,  
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan  
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Program pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/KotaProgram pemenuhan Hak Anak (PHA)
    - i. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - i. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - ii. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## 6. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota
  - i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - ii. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## C. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
  - 1.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - 1.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - 1.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 1.1.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 1.1.5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 1.1.6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 1.1.7 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

#### **D. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah**

- 1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

## 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.9

## 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel 3.3**  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Pengerjaan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
3	4	5		9	10			11	12			
2	08			<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR- BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					499.300.000			
2	08	02		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Kota Singkawang	12,50%	118.000.000	APBD DAU		12,70%	118.000.000
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatann Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Kota Singkawang	77%	77.400.000			85%	77.400.000
2	08	02	2.02	01 Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		22 Organisasi	34.400.000			25 Organisasi	34.400.000
2	08	02	2.02	02 Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Organisasi	43.000.000			5 Organisasi	43.000.000

2	08	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan</b>	Kota Singkawang	73%	40.600.000			74%	40.600.000
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang mendapatkan Peningkatan Kapasitasd		50 orang	23.100.000			50 orang	23.100.000
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang tersedia		30 dokumen	17.500.000			30 paket	17.500.000
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	Kota Singkawang	78%	75.000.000	APBD DAU		80%	75.000.000
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	Kota Singkawang	100%	27.500.000			100%	27.500.000
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		1 dokumen	27.500.000			1 dokumen	27.500.000

2	08	03	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi</b>	Kota Singkawang	84%	47.500.000			87%	47.500.000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten / kota yang mendapatkan layanan pengaduan		10 orang	47.500.000			10 orang	47.500.000
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti</b>	Kota Singkawang	92%	30.000.000	APBD DAU		93%	30.000.000
2	08	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan kepala rumah tangga</b>		21%	30.000.000			21%	30.000.000
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	30.000.000
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Cakupan Lembaga yang melaksanakan pemenuhan Hak Anak</b>	Kota Singkawang	39%	160.000.000	APBD DAU		40%	160.000.000
2	08	06	2.01		<b>Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan jumlah lembaga yang melakukan pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha</b>	Kota Singkawang	2 lembaga	30.000.000			2 lembaga	30.000.000

2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi pelebagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	30.000.000
2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	Kota Singkawang	67%	130.000.000			69%	130.000.000
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		95 orang	93.000.000			95 orang	93.000.000
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota		1 dokumen	37.000.000			1 dokumen	37.000.000
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif</b>	Kota Singkawang	90%	75.000.000	APBD DAU		90%	75.000.000
2	08	07	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Persentase penyediaan layanan AMPK yang memerlukan koordinasi</b>	Kota Singkawang	91%	75.000.000			93%	75.000.000
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten / Kota		26 orang	44.200.000			24 orang	44.200.000

2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota		1 dokumen	30.800.000			1 dokumen	30.800.000
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir</b>		<b>100%</b>	<b>38.500.000</b>	<b>APBD DAU</b>		<b>100%</b>	<b>41.300.000</b>
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan dokumen profil gender dan anak		100%	38.500.000			100%	41.300.000
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia		1 dokumen	38.500.000			1 dokumen	41.300.000
<b>1</b>	<b>06</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR-BIDANG SOSIAL</b>				<b>1.447.502.571</b>				<b>1.524.265.132</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Telah Diberdayakan</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>40,00%</b>	<b>183.000.000</b>	<b>APBD DAU</b>		<b>60,00%</b>	<b>192.050.000</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksannya penerbitan Izin sesuai aturan</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	20.000.000

1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	Kota Singkawang	40,00%	163.000.000			42,00%	172.050.000
1	06	02	2.03	01	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		46 PSM	49.500.000			46 PSM	54.450.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	19.500.000			5 Orang	19.500.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Keluarga	27.500.000			10 Keluarga	30.000.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Lembaga	50.500.000			4 Lembaga	50.500.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		2 sertifikat	16.000.000			1 sertifikat	17.600.000
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.096.086.018</b>	<b>APBD DAU</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.096.375.617</b>

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Kota Singkawang	100,00%	871.711.018			100,00%	846.975.617
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	468.111.018			45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	439.395.617
2	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		13 AT 17 PD	19.800.000			12 AT 17 PD	18.480.000
3	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		21 LU 17 PD	22.000.000			21 LU 17 PD	24.200.000
4	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2 orang	25.000.000			2 orang	25.000.000
5	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		40 orang	36.000.000			40 orang	36.000.000
6	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	23.000.000			10 Orang	23.000.000

7	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Orang	11.000.000			9 Orang	12.100.000
8	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	12.750.000			10 Orang	12.750.000
9	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		11 Orang	8.750.000			11 Orang	8.750.000
10	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	36.750.000			20 Orang	37.550.000
11	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Orang	8.550.000			8 Orang	9.750.000
12	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		43 Orang	200.000.000			43 Orang	200.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	Kota Singkawang	<b>100,00%</b>	<b>224.375.000</b>			<b>100,00%</b>	<b>249.400.000</b>
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Orang	4.750.000			8 Orang	4.750.000
2	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	18.755.000			10 Orang	18.790.000

3	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	99.000.000			30 Orang	99.000.000
4	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.000.000			20 Orang	8.800.000
5	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	40.000.000			5 Orang	38.000.000
6	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	6.000.000			10 Orang	6.000.000
7	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	15.000.000			50 Orang	15.000.000
8	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000			20 orang	10.500.000
9	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	7.850.000			9 Orang	8.215.000
10	06	04	2.02	10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.590.000			5 Orang	6.610.000

11	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	4.655.000			4 Orang	4.845.000
12	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Orang	3.775.000			2 Orang	3.890.000
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	Kota Singkawang	100%	7.700.000	APBD DAU		100%	8.000.000
1	06	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	Kota Singkawang	100%	7.700.000			100%	8.000.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	7.700.000			25 Orang	75.000.000
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Skala Kota</b>	Kota Singkawang	100%	160.716.553	APBD DAU		100%	160.839.515
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	Kota Singkawang	100%	90.027.965			100%	90.027.965
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x7 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		287 Orang	55.000.000			305 Orang	55.000.000

2	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		43 Orang	15.027.965			68 Orang	15.027.965
3	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Unit	10.000.000			1 Unit	10.000.000
4	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		17 Orang	7.000.000			29 Orang	7.000.000
5	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Orang	3.000.000			16 Orang	3.000.000
<b>2</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Skala Kota</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>70.688.588</b>			<b>100%</b>	<b>70.811.550</b>
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		1 KSB	35.688.588			1 KSB	35.811.550
2	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		28 Orang	35.000.000			28 Orang	35.000.000
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>73,00%</b>	<b>166.292.000</b>	<b>APBD</b>		<b>74,00%</b>	<b>176.356.200</b>
						<b>Persentase Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>

1	06	05	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Anak-anak terlantar Skala Kota</b>	Kota Singkawang	100,00%	23.600.000			100,00%	25.750.000
2	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Orang	23.600.000			28 Orang	25.750.000
2	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota</b>	Kota Singkawang	52,00%	142.692.000			53,00%	150.606.200
						<b>Persentase Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS</b>	Kota Singkawang	100%	100.000.000			100%	100.000.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang didata		600 KK	63.831.570			600 KK	70.214.727
2	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir miskin Kab/Kota		300 KK	54.644.260			300 KK	60.108.686
3	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		6.572 KPM PKH	100.000.000			6.212 KPM PKH	100.000.000
4	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		120 orang	24.216.170			135 orang	20.282.787
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan Kondisi Baik</b>	Kota Singkawang	100%	102.000.000	APBD DAU		100%	54.156.279
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)</b>	Kota Singkawang	100%	102.000.000			100%	54.156.279
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0				0

1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan		1 TMP	102.000.000			1 TMP	54.156.279
<b>2</b>	<b>13</b>				<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>495.000.000</b>				<b>544.500.000</b>
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan</b>	Kota Singkawang	100%	110.000.000	APBD DAU		100%	121.000.000
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase data profil dan Evaluasi perkembangan Kelurahan yang selesai dan tepat waktu</b>	Kota Singkawang	100%	110.000.000			100%	121.000.000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Ketersediaan Data Profil Kelurahan		26 Data Profil	38.500.000			26 Data Profil	42.350.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		26 Dokumen	71.500.000			26 Dokumen	78.650.000
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kota Singkawang	25,00%	385.000.000	APBD DAU		37,00%	423.500.000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan yang diberdayakan	Kota Singkawang	2 lembaga	385.000.000			3 lembaga	423.500.000

2	13	05	2.01	02	fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat	jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat		2 LKK/LAD /MHA	49.500.000			3 LKK/LAD /MHA	54.450.000
2	13	5	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya		2 LKK/LAD /MHA	60.500.000			3 LKK/LAD /MHA	66.550.000
2	13	5	02.01	4	fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya		2 LKK/LAD /MHA	110.000.000			3 LKK/LAD /MHA	121.000.000
2	13	5	201	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat		1 laporan	49.500.000			1 laporan	54.450.000
2	13	5	02.01	7	fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat		1 laporan	27.500.000			1 laporan	30.250.000
2	13	5	02.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		1 dokumen	38.500.000			1 dokumen	42.350.000
2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga		1 dokumen	49.500.000			1 dokumen	54.450.000

X	XX				URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH				4.767.295.225				4.852.395.225
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Singkawang	100%	4.767.295.225	APBD DAU		100%	4.852.395.225
1	06	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	Kota Singkawang	100%	38.500.000			100%	42.000.000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	5.500.000			2 Dokumen	6.000.000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	5.500.000			3 Laporan	6.000.000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	5.500.000			2 Laporan	6.000.000

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>3.456.695.225</b>			<b>100%</b>	<b>3.462.195.225</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 orang	3.286.195.225			30 orang	3.286.195.225
2	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	165.000.000			1 Dokumen	170.000.000
3	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.500.000			1 Laporan	6.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	-			-	-
2	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.500.000			1 Laporan	6.000.000
3	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik		1 Laporan	5.500.000			1 Laporan	6.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>37.000.000</b>
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	35.000.000			1 Paket	37.000.000
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-

1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>434.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>442.000.000</b>
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.500.000			1 Paket	11.000.000
2	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	75.000.000			1 Paket	80.000.000
3	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.500.000			1 Paket	9.000.000
4	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.500.000			1 Paket	4.000.000
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	25.500.000			1 Paket	26.000.000
6	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
7	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	300.000.000
8	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5.500.000			1 Dokumen	6.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	25.000.000			3 unit	15.000.000
2	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	50.000.000				-

3	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	35.000.000			3 unit	15.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>587.100.000</b>			<b>100%</b>	<b>672.200.000</b>
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	2.100.000			1 Laporan	2.200.000
2	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	170.000.000			1 Laporan	200.000.000
3	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	65.000.000			1 Laporan	70.000.000
4	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	350.000.000			1 Laporan	400.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	35.000.000			1 unit	40.000.000
2	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	45.000.000			2 unit	50.000.000

4	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	15.000.000			30 unit	15.000.000	
									<b>7.574.589.796</b>				<b>7.683.972.836</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2024 tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2024, maka disusun beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang.

Mengenai rincian atas lokasi, penerima manfaat, indikator kinerja, target, pagu indikatif, prakiraan maju, dan sumber anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1

## Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		UNIT PD PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
X	XX				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02			PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	13%	492.000.000			7%	41.449.500		DAU	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Organisasi Masyarakat	12,50 %	118.000.000	Dinas Sosial PPPA	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota	7%	35.000.000			0%	-				Perangkat Daerah/OPD		-		

2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota	0%	35.000.000												
2	08	02	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatann Pemberdayaa n Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>95%</b>	<b>300.200.000</b>					<b>7%</b>	<b>41.449.500</b>				<b>pengurus organisasi perempuan</b>	<b>77%</b>	<b>77.400.000</b>
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	27 organisasi	128.200.000										1 dokumen		34.400.000

2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	172.000.000										22 organisasi	41.449.500								5 Organisasi	43.000.000
2	08	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan</b>	<b>75%</b>	<b>156.800.000</b>										<b>0%</b>	<b>-</b>							<b>Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>	<b>73%</b>	<b>40.600.000</b>
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang mendapatkan Peningkatan Kapasitasd	50 orang	89.300.000																			50 orang	23.100.000
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang tersedia	120 dokumen	67.500.000																			30 dokumen	17.500.000

2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	<b>85%</b>	<b>320.000.000</b>				<b>62%</b>	<b>14.980.000</b>			<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter</b>		<b>78%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>
2	08	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>107.500.000</b>				<b>0%</b>	<b>-</b>			<b>Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</b>		<b>100%</b>	<b>27.500.000</b>	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	4 dokumen	107.500.000										1 dokumen	27.500.000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	29 OPD	-										-	-	

2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi	92%	197.500.000				100%	14.980.000				Perempuan Korban Kekerasan	84%	47.500.000	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten / kota yang mendapatkan layanan pengaduan	40 orang	182.500.000										10 orang	47.500.000	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota	24 layanan	15.000.000				6 layanan	14.980.000					0%	-	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100%					0%	-				Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			

2	08	03	2.03	02	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	1 dokumen	15.000.000												
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Cakupan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Berbasis Gender yang ditindaklanjuti</b>	95%	165.000.000				0%	-					93%	30.000.000	Dinas Sosial PPPA
2	08	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan kepala rumah tangga</b>	20%	165.000.000				0%	-				<b>Perangkat Daerah/OPD</b>	21%	30.000.000	
2	08	04	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	29 opd	30.000.000												

				02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										1 dokumen	30.000.000			
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	4 dokumen	135.000.000												
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Cakupan Lembaga yang melaksanakan Hak Anak</b>	<b>42%</b>	<b>760.000.000</b>			<b>38%</b>	<b>87.708.000</b>			<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter</b>		<b>93%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah lembaga yang melakukan pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	68 lembaga	170.000.000			0%	-			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	21%	160.000.000			

2	08	06	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	120 organisasi	30.000.000											
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	4 dokumen	140.000.000									1 dokumen	30.000.000	
2	08	06	2.02		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak</b>	<b>71%</b>	<b>590.000.000</b>			<b>2 lembaga</b>	<b>87.708.000</b>				<b>Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>67%</b>	<b>130.000.000</b>	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	380 orang	372.000.000			95 orang	70.458.000					95 orang	93.000.000	

2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	43.000.000					1 dokumen	17.250.000				0%	-		
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	10.000.000										0%	-		
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota		165.000.000										1 dokumen	37.000.000		
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif</b>	<b>90%</b>	<b>409.000.000</b>					<b>90%</b>	<b>27.065.000</b>						<b>75.000.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>
																				<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter</b>	

2	08	07	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase OPD yang aktif dalam pencegahan kekerasan anak</b>	66%	25.000.000				0%	-						<b>Perangkat Daerah/ OPD</b>			
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	25.000.000														
2	08	07	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Persentase penyediaan layanan AMPK yang memerlukan koordinasi</b>	95%	324.000.000				60%	27.065.000						<b>Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>		44.200.000	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		168.600.000			28 orang		27.065.000							26 orang	44.200.000	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		25.000.000												0%	-	

2	08	07	2.03		<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan AMPK</b>	<b>66%</b>	<b>60.000.000</b>				<b>0%</b>	<b>-</b>				<b>Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>		<b>30.800.000</b>		
2	08	07	2.03	02	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar		30.000.000											0		
2	08	07	2.03	03	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK		30.000.000										1 Dokumen	30.800.000		
					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK												1 Dokumen			
					Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kot	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak													0	0	

					a																	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase penyediaan dokumen data profil gender yang mutakhir	100 %	160.200.000						-						100 %	38.500.000	Dinas Sosial PPPA
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan dokumen profil gender dan anak	100 %	160.200.000						-				OPD	100 %	38.500.000		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 dokumen	160.200.000											100 %	38.500.000		
X	XX				URUSAN SOSIAL																	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Telah Diberdayakan	100 %	752.305.000	50%	18.000.000							Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	100 %	183.000.000	Dinas Sosial PPPA		
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksannya penerbitan izin sesuai aturan	100 %	80.000.000	0%	-							Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 %	20.000.000			

1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	80.000.000									1 Dokumen	20.000.000		
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	42%	672.305.000				96%	18.000.000				<b>Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	40%	163.000.000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	46 PSM	208.845.000										46 PSM	49.500.000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	78.000.000				5 orang	18.000.000					5 Orang	19.500.000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	115.500.000										10 Keluarga	27.500.000	

1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Lembaga	202.000.000								4 Lembaga	50.500.000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	67.960.000								2 sertifikat	16.000.000	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>100 %</b>	<b>4.820.632.765</b>			<b>49%</b>	<b>233.908.300</b>		<b>SPM</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>1.096.086.018</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100 %	3.842.480.765				23%	223.743.500				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100 %	871.711.018	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 LU 160 AT 132 PD 32 Gepe ng	2.122.280.265				115 orang	193.299.900					45 LU 40 AT 33 PD 10 Gepe ng	468.111.018	
2	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 AT 0 PD	76.560.000										13 AT 17 PD	19.800.000	
3	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	85 LU 67 PD	92.820.000										21 LU 17 PD	22.000.000	

						Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
4	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang	105.000.000												2 orang	25.000.000		
5	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	144.000.000			20 orang	30.443.600									40 orang	36.000.000	
6	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	92.000.000													10 Orang	23.000.000	
7	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	30 Orang	52.300.000														7 Orang	11.000.000



1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	978.152.000				26%	10.164.800					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	100 %	224.375.000	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	19.000.000											6 Orang	4.750.000	
2	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	75.093.000											10 Orang	18.755.000	
3	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	432.000.000											30 Orang	99.000.000	
4	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	75 Orang	32.480.000											20 Orang	8.000.000	

						Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota														
5	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	156.000.000			8 orang	10.164.800							7 Orang	40.000.000
6	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	24.000.000											11 Orang	6.000.000
7	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang	60.000.000											45 Orang	15.000.000
8	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	41.000.000											20 orang	10.000.000

9	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	33.255.000										8 Orang	7.850.000	
10	06	04	2.02	10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	26.384.000											5 Orang	6.590.000
11	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	18.830.000											5 Orang	4.655.000
12	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	15.110.000											3 Orang	3.775.000
13	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota														

14	06	04	2. 0 2	14	KERJA Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Doku men	45.000.000										
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100 %</b>	<b>165.200.000</b>			<b>100%</b>	<b>7.444.500</b>				<b>100 %</b>	<b>7.700.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>
1	06	03	2. 0 1		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	<b>100 %</b>	<b>165.200.000</b>			<b>100%</b>	<b>7.444.500</b>			<b>Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan</b>	<b>100 %</b>	<b>7.700.000</b>	
1	06	03	2. 0 1	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Oran g	165.200.000			13 orang	7.444.500				25 Oran g	7.700.000	

1	06	06			PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota	100 %	623.185.914				100%	94.226.300			SPM	Meningkatn ya Penangan an Masalah Kesejahtera an Sosial	100 %	160.716.553	Dinas Sosial PPPA	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Ko ta	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	375.111.860				100%	61.340.500					Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	90.027.965	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x7 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1.189 Orang	220.000.000				150 orang	54.340.500						287 Orang	55.000.000	
2	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	247 Orang	70.111.860											43 Orang	15.027.965	
3	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Ko ta	3 Unit	45.000.000											1 Unit	10.000.000	
4	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	92 Orang	28.000.000				30 orang	7.000.000						17 Orang	7.000.000	



1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin	75%	683.694.769				75%	180.130.000					166.292.000	Dinas Sosial PPPA
						Persentase Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin	100%	410.000.000				75%	74.871.500					100.000.000	Dinas Sosial PPPA
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-anak terlantar Skala Kota	100%	92.660.000				100%	67.860.000				Anak yang berhadapan dengan hukum Kota Singkawang	100%	23.600.000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang	92.660.000				28 orang	67.860.000					27 Orang	23.600.000
3	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	54%	591.034.769				49%	112.270.000				Fakir Miskin	52%	142.692.000

						Persentase Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS	100 %	410.000.000			90%	74.871.500					Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	49%	100.000.000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang didata	2400 KK	269.311.197			700 orang	57.794.000						600 KK	63.831.570	
2	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir miskin Kab/Kota	1200 KK	230.549.101			300 keluarga	49.676.000						300 KK	54.644.260	
3	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.891 KPM PKH	410.000.000			7391 kpm	74.871.500						6.572 KPM PKH	100.000.000	
4	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	145 orang	91.174.472			100 orang	4.800.000						120 orang	24.216.170	
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan</b>	<b>100 %</b>	<b>764.447.670</b>			<b>100%</b>	<b>108.688.351</b>						<b>100 %</b>	<b>102.000.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>

						Kondisi Baik																
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	100 %	764.447.670						100%	108.688.351			Taman Makam Pahlawan Bambu Runcing	100 %	102.000.000		
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	468.807.020						1 dokumen	50.000.000				1 Dokumen		0	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan	1 TMP	295.640.650						1 TMP	58.688.351					1 TMP		102.000.000
X	XX				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100 %	464.100.000							-					100 %	110.000.000	Dinas Sosial PPPA
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase data profil dan Evaluasi perkembangan Kelurahan yang selesai dan tepat waktu	100 %	464.100.000							-			Kelurahan	100 %	110.000.000		

2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Ketersediaan Data Profil Kelurahan	26 Data Profil	162.435.000									26 Data Profil	38.500.000		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26 Dokumen	301.665.000										26 Dokumen	71.500.000	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>50%</b>	<b>1.624.350.000</b>									<b>lembaga kemasyarakatan</b>	<b>25%</b>	<b>385.000.000</b>	<b>Dinas Sosial PPPA</b>
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan yang diberdayakan</b>	<b>4 lembaga</b>	<b>1.624.350.000</b>									<b>2 lembaga</b>	<b>385.000.000</b>		
2	13	05	2.01	02	fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat	jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga	4 LKK/LAD/MHA	208.845.000										2 LKK/LAD/MHA	49.500.000	

						adat kelurahan dan masyarakat hukum adat														
2	13	5		3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan	jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 LKK/ LAD/ MHA	255.255.000											2 LKK/ LAD/ MHA	60.500.000
2	13	5	# # #	4	fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat Kelembagaan	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 LKK/ LAD/ MHA	464.100.000											2 LKK/ LAD/ MHA	110.000.000
2	13	5	2 0 1	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	4 lapor an	208.845.000											1 lapor an	49.500.000
2	13	5		7	fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	4 lapor an	116.025.000											1 lapor an	27.500.000

2	13	5		8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	4 dokumen	162.435.000									1 dokumen	38.500.000		
2	13	5		9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	4 dokumen	208.845.000										1 dokumen	49.500.000	
X	XX				<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH AN DAERAH</b>															
X	XX	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.444.380.900			100%	3.993.873.425						100%	4.767.295.225	Dinas Sosial PPPA
1	06	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	161.000.000			100%	5.736.000						100%	38.500.000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	23.000.000			2 Dokumen	2.868.000						2 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	23.000.000										1 Dokumen	5.500.000	

						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	23.000.000											1 Dokumen	5.500.000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	23.000.000											1 Dokumen	5.500.000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	23.000.000											1 Dokumen	5.500.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	23.000.000				3 laporan	2.868.000						3 Laporan	5.500.000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	23.000.000											2 Laporan	5.500.000

					Perangkat Daerah														
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100 %</b>	<b>13.837.780.900</b>			<b>100%</b>	<b>3.403.829.225</b>						<b>100 %</b>	<b>3.456.695.225</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	13.144.780.900			25 orang	3.286.195.225						30 orang	3.286.195.225
2	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	670.000.000			1 dokumen	114.930.000						1 Dokumen	165.000.000
3	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	23.000.000			1 laporan	2.704.000						1 Laporan	5.500.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>71.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>10.950.000</b>						<b>100 %</b>	<b>11.000.000</b>
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000			1 laporan	10.950.000						-	-

2	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	23.000.000									1 Laporan	5.500.000		
3	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 Laporan	23.000.000										1 Laporan	5.500.000	
1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>144.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>32.270.000</b>						<b>100 %</b>	<b>35.000.000</b>	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	144.000.000			1 paket	32.270.000						1 Paket	35.000.000	
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	-										1 Dokumen	-	
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>1.752.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>182.748.700</b>						<b>100 %</b>	<b>434.000.000</b>	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.000.000			1 paket	4.982.500						1 Paket	10.500.000	
2	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	310.000.000			1 paket	53.171.100						1 Paket	75.000.000	

					Kantor yang Disediakan														
3	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	35.000.000									1 Paket	8.500.000	
4	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000									1 Paket	3.500.000	
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	103.000.000		1 paket	10.226.100						1 Paket	25.500.000	
6	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.000.000		1 dokumen	3.684.000						1 Dokumen	5.500.000	
7	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.200.000.000		1 laporan	110.685.000						1 Laporan	300.000.000	
8	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	23.000.000									1 Dokumen	5.500.000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	455.000.000		0%	-						100 %	110.000.000	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

						yang Disediakan												
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	240.000.000									5 Unit	25.000.000
2	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100.000.000									1 unit	50.000.000
3	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	115.000.000									5 Unit	35.000.000
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>2.523.600.000</b>			<b>100%</b>	<b>305.425.700</b>					<b>100 %</b>	<b>587.100.000</b>
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.600.000									1 Laporan	2.100.000
2	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	740.000.000			1 laporan	118.799.460					1 Laporan	170.000.000
3	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Laporan	275.000.000									1 Laporan	65.000.000

					Disediakan														
4	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000.000			1 laporan	186.626.240					1 Laporan	350.000.000	
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>52.913.800</b>					<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	150.000.000			1 unit	23.975.000					1 unit	35.000.000	
2	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	190.000.000			1 unit	16.188.800					2 unit	45.000.000	
3	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	100.000.000									-	0	

4	06	01	2. 0 9	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	30 unit	60.000.000				19 unit	12.750.000				30 unit	15.000.000		
<b>JUMLAH</b>									32.058.497.018				4.882.344.876						7.574.589.796	

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2024. Selain itu Renja sebagai landasan operasional isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efektif dan efisien.

Renja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan pencapaian Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

Renja ini juga disusun berdasarkan skala prioritas, sesuai aspirasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja serta menjaring masukan dari hasil musrenbang kecamatan. Dengan demikian maka diharapkan program yang akan dilaksanakan dapat mengakomodir semua kegiatan unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

## B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penetapan program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang selaras dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang teknis.
2. Dalam mencapai perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu diterapkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5. Dalam proses penyusunannya Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPD Kota, RKPD Kota dan Renstra Perangkat Daerah).

### C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan target Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait maupun menghimpun data primer.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan kepegawaian.
3. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan.
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Singkawang, April 2023



KEPALA DINAS

**SUTIYARTO, S.ST.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660514 199010 1 001



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang 79123

Telp / Fax. (0562) 639472

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**  
**NOMOR 821/43 /DISSOSPPA. Set-B**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS**  
**SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK KOTA SINGKAWANG;**

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SINGKAWANG,



**SUTIRTO, S.ST, M.Si**

Pembina Tk.I

NID 19660514 199010 1 001

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- 1. Wali Kota Singkawang*
- 2. Inspektur Kota Singkawang*
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang*
- 4. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 821/43/DISSOSPPPA. Set-B

TANGGAL : 29 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Ket</b>
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Sekretaris	
3	Kabid Rehabilitas Perlindungan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang RPJS	
4	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	Koordinator Bidang PSPK	
5	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator Bidang PPPA	
6	Kasubag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota	
7	Kasubag Administrasi umum dan Aset	Anggota	
8	Peksos di Lingkungan Dinas Sosial, PPPA	Anggota	
9	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
10	Pengelola Keuangan	Anggota	

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG,



**SUTINARTO, S.ST, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19660514 199010 1 001

